

PENGARUH AKSES SANITASI TERHADAP PERILAKU STOP BABS PILAR PERTAMA STBM DI KECAMATAN MEDAN LABUHAN DAN MEDAN PERJUANGAN DI KOTA MEDAN

Nur Delina Sinambela^{1*}, Eka Fitria Saragih², Susilawati³, Dwi Azura Rahmadanty⁴
Rmania Sabina⁵, Halimatus Sa'diyah Dalimunthe⁶, Dini Azila Putri⁷

Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan^{1,2,3,4,5,6,7}

*Corresponding Author : nurdelina2003@gmail.com

ABSTRAK

Buang air besar Sembarangan di daerah kota Medan tercatat dinkes provinsi 2023 masih 78 desa sekitar 51,66% dari jumlah desa sebanyak 151, masih ada 73 desa yang belum melaksanakan STBM sekitar 48,34%. Tujuan penelitian ini adalah analisis pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar pertama di daerah Kota Medan yaitu Kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Labuhan dan untuk melihat perbandingan antara akses sanitasi terhadap perilaku Stopbabs di daerah Medan Perjuangan dan Medan Labuhan. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data yang di gunakan bersifat data sekunder berasal dari data progres bulanan STBM STOP BABS Dinas Kesehatan Kota Medan 2023. Populasi penelitian ini sebanyak 572.084 sampel dari penelitian pada kedua Kecamatan sejumlah 53.485 KK. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh nilai p Value 0,001 yang bermakna terdapat korelasi yang signifikan. Maka dengan demikian diperoleh nilai R 0,786 yang bermakna hubungan yang sangat kuat di antara kedua variable karena $0,786 > 0,76$. Sehingga dapat disimpulkan perbandingan KK BABS masih cukup tinggi di daerah pesisir dibanding kan daerah perkotaan, terdapat di kecamatan medan perjuangan dan medan Labuhan. mengindikasikan perlunya perbaikan sanitasi di daerah pesisir, keterbatasan akses sanitasi di daerah pesisir menjadi faktor utama penyebab tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Kata kunci : akses sanitasi, stop BABS

ABSTRACT

Open defecation in the Medan city area was recorded by the provincial health office in 2023, there are still 78 villages, around 51.66% of the total number of villages of 151, there are still 73 villages that have not implemented STBM, around 48.34%. The aim of this research is to analyze the implementation of the first pillar of Community-Based Total Sanitation (STBM) in the Medan City area, namely Medan Perjuangan and Medan Labuhan Districts and to see the comparison between sanitation access and Stopbabs behavior in the Medan Perjuangan and Medan Labuhan areas. This research method uses quantitative methods with a descriptive analysis approach. The data used is secondary data and comes from the monthly STBM STOP BABS progress data of the Medan City Health Service 2023. The population of this study was 572,084 samples from research in the two sub-districts totaling 53,485 families. Based on the research results, a p value of 0.001 was obtained, which means there is a significant correlation. So, an R value of 0.786 is obtained, which means a very strong relationship between the two variables because 0.786 is > 0.76 . So it can be concluded that the ratio of KK defecation is still quite high in coastal areas compared to urban areas, found in Medan Perusahaan and Medan Labuhan sub-districts. Indicates the need to improve sanitation in coastal areas, limited access to sanitation in coastal areas is the main factor causing the high number of Open Defecation (Open Defecation) rates.

Keywords : access to sanitation, stop defecating

PENDAHULUAN

Data Direktorat Penyehatan Lingkungan per 9 Januari 2023, rumah tangga yang masih melakukan BABS di jamban sendiri/bersama di Provinsi Sumatera Utara mencapai lebih 80%

dan untuk persentase desa/kelurahan yang telah melakukan deklarasi SBS di Provinsi Sumatera Utara sudah mencapai 20%. Berdasarkan data tersebut, masih banyak ditemukan rumah tangga yang melakukan BABS walaupun sudah memiliki jamban. Kepemilikan jamban tidak memastikan seseorang melakukan STOP BABS. Hal ini bisa saja disebabkan karena tidak memiliki septic tank atau septic tank yang ada dialirkan/dibocorkan ke sungai, laut dan area terbuka lainnya yang berisiko mencemari lingkungan. Adapun yang dikatakan STOP BABS tidak dilihat dari kepemilikan jamban, tetapi perubahan perilaku nya yang dapat berdampak pada lingkungan. (Direktorat Penyehatan lingkungan, 2023).

Data tersebut menunjukan persentase rumah tangga yang memiliki jamban mencapai lebih dari 80 % namun, yang sudah melakukan deklarasi SBS hanya sekitar 20% saja. Hal ini perlu dipahami bahwa, ketika suatu desa/kelurahan ingin melakukan deklarasi SBS, maka tidak berlaku hanya untuk rumah tangga saja yang BAB di jamban, tetapi semua fasilitas publik seperti, sekolah, puskesmas, terminal, stasiun, dan lainnya. Juga dilihat dari bagaimana kotoran manusia nantinya dialirkan, apakah menggunakan septic tank yang aman atau dialirkan ke area terbuka yang masih dikategorikan BABS.

Berdasarkan data progres STBM Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 pilar pertama STOP BABS diketahui bahwa Kota Medan menduduki peringkat ke-24 dari total 33 kab/kota dalam perilaku STOP BABS. Dari jumlah total keseluruhan 151 kelurahan hanya 6 kelurahan (3,97%) yang sudah melakukan STOP BABS dan yang sudah melaksanakan STBM sebanyak 78 kelurahan (51,66%). Pelaksanaan STBM dan STOP BABS dikatakan berhasil, jika jumlah pelaksanaan mencapai 80% dan dikatakan sempurna dalam pelaksanaannya jika sudah mencapai 100%. Dilihat dari data progres STBM tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kota Medan belum berhasil dalam pelaksanaan STBM dan pelaksanaan STOP BABS (Dinkes Provsu,2023).

Sanitasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan, dan upaya untuk menjaga kesehatan lingkungan dan komponen yang ada pada lingkungan seperti air, tanah dan udara. Selain itu Sanitasi dapat membentuk pola perilaku yang lebih sehat, dan menjadi strategi agar tidak bersentuhan langsung dengan sesuatu yang di anggap kotor dan berbahaya bagi kesehatan. Namun negara Indonesia masuk dalam kategori Negara kedua yang memiliki sanitasi yang buruk. Sementara sanitasi yang buruk dapat memicu berbagai jenis penyakit yang dapat menurunkan status kesehatan. Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Labuhan menduduki posisi kedua dengan total BABS sebanyak 4359 KK (53,13%), dari total 8204 Kelurahan, dengan cara BABS secara terbuka. Hal ini menjadi salah satu yang harus di perhatikan karena Kecamatan Medan Labuhan adalah daerah pesisir dengan akses sanitasi yang masih kurang.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di beberapa wilayah Kota Medan terutama, kecamatan medan perjuangan dan medan labuhan masih melakukan perilaku BABS.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar pertama di daerah Kota Medan yaitu Kecamatan Medan Perjuangan dan Medan Labuhan. Data yang di gunakan merupakan data sekunder berasal dari data progres bulanan STBM STOP BABS Dinas Kesehatan Kota Medan 2023. Populasi penelitian ini sebanyak 572.084 sampel dari penelitian pada kedua Kecamatan sejumlah 53.485 KK sebanyak Kemudian data di analisis menggunakan SPSS dengan Uji Univariat dan Uji Bivariat untuk melihat perbandingan pelaksanaan STBM pada perilaku STOPBABS di Kota dan Daerah Pesisir menggunakan uji korelasi *spearman*.

HASIL**Analisis Univariat****Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Akses Sanitasi pada Daerah Pesisir, Kecamatan Medan Labuhan**

Kelurahan	Jumlah KK	Akses Aman (Septitank Kedap)	Akses Layak (JSP)	Tidak Memiliki Jamban (Numpang/Sharing)	Akses Belum Layak (JSSP)
Besar	10051	0	9851	200	0
Martubung	4399	0	1061	2165	0
Nelayan Indah	2185	1200	366	34	200
Pekan Labuhan	8204	0	2165	1630	50
Sei Mati	3694	0	2411	0	0
Total	28.473	1200	15.854	4.029	250

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi jumlah akses sanitasi pada Daerah Pesisir Kecamatan Medan Labuhan diperoleh kelurahan Besar dengan jumlah KK sebanyak 10051 KK, akses aman (septitank kedap) sebanyak 0 KK, namun akses layak (JSP) sebanyak 9851 KK, akses belum layak (JSSP) tercatat 0 serta masyarakat yang tidak memiliki jamban atau numpang/sharing sebanyak 200 KK. Selanjutnya di kelurahan Martubung diperoleh dengan jumlah KK 4399, akses aman (septitank kedap) berjumlah 0, akses layak (JSP) sebanyak 1061 KK. Selanjutnya tidak memiliki jamban atau numpang/sharing 2165 KK, Serta akses belum layak (JSSP) sejumlah 0. Selanjutnya kelurahan Nelayan Indah diperoleh dengan jumlah KK 2185, akses aman (septitank kedap) sebanyak 1200 KK, akses layak (JSP) sejumlah 366 KK, selanjutnya tidak memiliki jamban atau numpang/sharing sejumlah 34 KK serta akses belum layak (JSSP) ada 200 KK. Selanjutnya Pekan Labuhan dengan jumlah KK 8204, akses aman (septitank kedap) sebanyak 0, namun akses layak (JSP) ada 2165 KK, tidak memiliki jamban atau numpang/sharing sebanyak 1630 KK serta akses belum layak (JSSP) ada 50 KK. Selanjutnya Labuhan Sei Mati dengan jumlah KK 3694, akses aman (septitank kedap) sebanyak 0, akses layak (JSP) sejumlah 2411 KK, namun tidak memiliki jamban atau numpang/sharing 0 serta akses belum layak tercatat sebanyak 0. Selanjutnya diperoleh total KK dari Kecamatan Medan Labuhan 28.473 KK, masyarakat dengan akses aman (septitank kedap) sejumlah 1200 KK, total dengan akses layak (JSP) sebanyak 15.854 selanjutnya total tidak memiliki jamban atau numpang/sharing sejumlah 4.029 KK serta total akses tidak layak sebanyak 250 KK.

Tabel 2. Distribusi Total Frekuensi Berdasarkan Jumlah Akses Sanitasi dan BABS pada Daerah Pesisir, Kecamatan Medan Labuhan

Kelurahan	Jumlah KK Akses Sarana	% Akses Sanitasi	Jumlah KK BABS
Besar	10051	> 80 Tercapai	0
Martubung	3226	< 80 Tidak Tercapai	1173
Nelayan Indah	1800	> 80 Tercapai	385
Pekan Labuhan	3845	< 80 Tidak Tercapai	4329
Sei Mati	2411	< Tidak Tercapai	1283
Total	21.333	< Tidak Tercapai	7170

Berdasarkan tabel 2 distribusi frekuensi berdasarkan jumlah akses sanitasi dan BABS pada Daerah pesisir, Kecamatan Medan Labuhan diperoleh, pada Kelurahan Besar jumlah KK akses sarana sebanyak 10051 sehingga akses sanitasi nya tercapai lebih dari atau sekitar 80% sehingga jumlah KK BABS tercatat 0 karena akses sanitasi nya terpenuhi. Kelurahan Martubung jumlah KK akses sarana sebanyak 3226 kurang dari 80% maka akses sanitasi nya

tidak tercapai dengan jumlah KK yang masih dengan perilaku BABS 1173 KK. Kelurahan Nelayan Indah jumlah KK akses sarana sebanyak 1800, akses sarana sekitar > 80% dengan kategori terpenuhi namun jumlah KK BABS masih ada sebanyak 385 KK. Kelurahan Pekan Labuhan jumlah KK akses sarana 3845, akses sanitasi nya tidak tercapai < 80% dengan jumlah KK BABS 4329 KK. Kelurahan Sei Mati dengan jumlah KK akses sarana 2411, akses sanitasi tidak tercapai <80% dengan jumlah KK BABS sebanyak 1283 KK. Total keseluruhan jumlah KK akses sarana di Kecamatan Medan Labuhan sebanyak 21.333, akses sanitasi yang tercapai hanya dua Kelurahan dan yang tidak tercapai empat Kelurahan.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Akses Sanitasi pada Daerah Perkotaan, Kecamatan Medan Perjuangan

Kelurahan	Jumlah KK	Akses Aman (Septitank Kedap)	Akses Layak (JSP)	Tidak Memiliki Jamban (Numpang/Sharing)	Akses Belum Layak (JSSP)
Pahlawan	2261	92	1748	397	19
Pandau Hilir	2786	1380	893	490	50
Sei Kara Hilir 1	3765	901	2103	662	79
Sei Kara Hilir 2	3554	579	2317	626	26
Sei Kara Hulu	2295	91	1732	403	55
Sidorame Barat 1	3922	0	941	690	76
Sidorame Barat II	2015	985	656	354	16
Sidorame Timur	2606	1589	530	458	23
Tegal Rejo	4069	1789	1463	715	82
Total	25.012	7406	12.383	4795	426

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi berdasarkan jumlah akses sanitasi pada daerah perkotaan, Kecamatan Medan Perjuangan di atas maka di peroleh Kelurahan Pahlawan dengan jumlah KK sebanyak 2261, akses aman (septitank kedap) berjumlah 92 KK, akses layak (JSP) berjumlah 1748. Masyarakat tidak memiliki jamban atau numpang/sharing sebanyak 397 serta akses belum layak (JSSP) ada 19 KK. Selanjutnya Kelurahan Pandau Hilir berjumlah 2786 KK, dengan akses aman (septitank kedap) sebanyak 1380 KK, akses layak (JSSP) ada 893 KK. Tidak memiliki jamban atau numpang/sharing sebanyak 490 KK. Serta masyarakat dengan akses belum layak ada 50 KK. Kelurahan Sei Kara Hilir 1 dengan jumlah KK 3765 KK, dengan akses aman (septitank kedap) ada sebanyak 901 KK. Akses layak (JSSP) ada sebanyak 2103 KK, serta yang tidak memiliki jamban atau numpang/sharing sejumlah 662 KK, serta akses belum layak (JSSP) ada sebanyak 79 KK.

Kelurahan Sei Kara Hilir 2 berjumlah 3554, dengan akses aman (septitank kedap) sebanyak 579 KK. Akses layak (JSP) sebanyak 2317 KK, selanjutnya tidak memiliki jamban atau numpang/sharing sebanyak 626 KK. Serta akses belum layak ada sebanyak 26 KK. Kelurahan Sei Kara Hulu berjumlah 2295 KK, akses aman (septitank kedap) sebanyak 91 KK. Akses layak (JSP) sebanyak 1732 KK, tidak memiliki jamban atau numpang/sharing ada sebanyak 403 serta akses belum layak sebanyak 55 KK. Kelurahan Sidorame Barat 1 berjumlah 3922 KK, akses aman (septitank kedap) sebanyak 0. Akses layak atau (JSP) sebanyak 941 KK. Tidak memiliki jamban atau numpang/sharing sebanyak 690 KK serta akses belum layak sebanyak 76 KK. Kelurahan Sidorame Barat 2 berjumlah 2015 KK, akses aman (septitank kedap) sebanyak 985 KK. Akses layak (JSP) ada sebanyak 656 KK dan tidak memiliki jamban atau numpang/sharing 354 KK serta akses belum layak ada 16 KK. Kelurahan Sidorame Timur berjumlah 2606 KK, akses aman (septitank kedap) sebanyak 1589 KK, akses layak (JSP) sebanyak 530 KK, tidak memiliki jamban atau numpang/sharing sebanyak 458 KKserta akses belum layak ada sebanyak 23 KK. Kelurahan Tegal Rejo berjumlah 4069 KK, akses aman (septitank kedap) sebanyak 1789 KK, akses layak (JSP) sebanyak 1463 KK, tidak memiliki jamban atau numpang/sharing sebanyak 715 KK serta

akses belum layak ada sebanyak 82 KK. Total keseluruhan di daerah perkotaan di Kecamatan Medan Perjuangan terdapat 25.012 KK, total akses aman (septitank kedap) ada 7406 KK, total akses layak (JSP) sebanyak 12.383 KK. Total tidak memiliki jamban atau numpang/sharing sebanyak 4795 KK serta total akses belum layak sebanyak 426 KK.

Tabel 4. Distribusi Total Frekuensi Berdasarkan Jumlah Akses Sanitasi pada Daerah Perkotaan, Kecamatan Medan Perjuangan

Kelurahan	Jumlah KK Akses Sarana	% Akses Sanitasi	Jumlah KK BABS
Pahlawan	2256	> 80 Tercapai	5
Pandau Hilir	2273	> 80 Tercapai	13
Sei Kara Hilir 1	3745	> 80 Tercapai	20
Sei Kara Hilir 2	3548	> 80 Tercapai	6
Sei Kara Hulu	2281	> 80 Tercapai	14
Sidorame Barat I	1707	< 80 Tidak Tercapai	2215
Sidorame Barat II	2011	> 80 Tercapai	4
Sidorame Timur	2600	> 80 Tercapai	6
Tegal Rejo	4049	> 80 Tercapai	20
Total	24.470	8 Tercapai	2303

Berdasarkan tabel distribusi total berdasarkan jumlah akses sanitasi pada daerah perkotaan Kecamatan Medan Perjuangan maka di peroleh di Kelurahan Pahlawan jumlah KK akses sarana sebanyak 2256 dengan akses sanitasi sekitar 80% tercapai namun perilaku BABS tercatat 5 KK. Kelurahan Pandau Hilir 1 jumlah KK akses sarana sebanyak 2273 dengan akses sanitasi yang tercapai sekitar 80%, angka BABS tercatat 13 KK. Kelurahan Sei Kara Hilir 1 akses sarana sejumlah 3745, dengan akses sanitasi sekitar 80% namun kejadian BABS tercatat 20 KK. Kelurahan Sei Kara Hilir 2 jumlah akses sarana nya berjumlah 3548, dengan akses sanitasi sekitar 80% dengan kejadian BABS tercatat 6 KK. Kelurahan Sei Kara Hulu dengan jumlah kk akses sarana sebanyak 2281, dengan akses sanitasi tercapai 80% sehingga 14 KK BABS tercatat. Kelurahan Sidorame Barat 1 dengan jumlah akses sarana 1707, namun akses sanitasi yang tidak tercapai kurang dari 80%, maka KK yang melakukan BABS sebanyak 20215 KK. Kelurahan Sidorame Barat 2 akses sarana berjumlah 2011, dengan akses sanitasi sekitar 80% yang bermakna tercapai, jumlah KK BABS sebanyak 4 KK. Kelurahan Sidorame Timur jumlah akses sarana sebanyak 2600, akses sanitasi nya tercapai sekitar 80% jumlah KK BABS tercatat 6 KK. Kelurahan Tegal Rejo akses sarana berjumlah 4049, dengan akses sanitasi yang tercapai sekitar 80%, jumlah KK BABS sebanyak 20 KK. Total keseluruhan akses sarana di Kecamatan Medan Perjuangan sebanyak 24.470 KK, akses sanitasi yang tercapai delapan Kelurahan, jumlah total KK BABS sebanyak 2303 KK.

Tabel 5. Korelasi antara Akses Sanitasi dengan BABS pada Daerah Perkotaan dan Pedesaan

Variabel	Coeficient	R	P-Value
Akses Sanitasi- Jumlah BABS	1,000	0,786	0,001

Berdasarkan tabel 5 korelasi antara akses sanitasi dengan BABS pada daerah perkotaan dan pedesaan maka ada dua variable yang di uji yaitu akses sanitasi dan jumlah BABS. Akses sanitasi nya merupakan yang terdapat pada masyarakat yang mendukung perilaku STOP BABS jika akses sanitasi yang ada baik. Jumlah KK BABS merupakan dekskripsi masyarakat per KK yang masih melakukan perilaku BABS. Maka di peroleh akses sanitasi dan jumlah BABS di daerah pesisir maupun di daerah perkotaan berkorelasi dengan nilai p

Value 0,001 yang bermakna terdapat korelasi yang signifikan. Selain itu diperoleh nilai R 0,786 yang bermakna hubungan yang sangat kuat di antara kedua variable karena $0,786 > 0,76$.

Tabel 6. Penelitian Terdahulu Studi Perbandingan antara Akses Sanitasi dengan BABS pada Daerah Perkotaan dan Perdesaan

No	Judul Jurnal	Hasil	Perbandingan
1.	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	Berdasarkan analisis bivariat diketahui bahwa ada hubungan sikap dengan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masyarakat Desa Pematang Jering ($p= 0,004$). Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Aulia et al (2021) bahwa terdapat hubungan sikap dengan perilaku BABS ($p=0,001$) pada masyarakat Desa Kamal Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.	Dari perbandingan ke dua jurnal tersebut maka di dapat di simpulkan bahwa di kota dan pesisir memiliki akses sanitasi jamban yang berbeda dengan jumlah jamban di kota 94,6% sedangkan di pesisir 74% yang mempunyai jamban. Penyebab perbedaan ini dapat di lihat dari faktor ekonomi masyarakat yang berbeda. Pada daerah kota masih banyak yang melakukan buang air besar sembarangan meskipun sudah memiliki jamban tetapi masih banyak yang tidak menggunakannya sebanyak 73,9% sedangkan di desa sedikit masyarakat yang memiliki jamban sehingga masyarakat memilih untuk buang air besar sembarangan..
2.	Gambaran Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi 2020	Sebelum adanya program STBM tersebut dimulai, beberapa penyakit di Kelurahan Morokrebang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. kesimpulannya yaitu dengan adanya pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) pada pilar pertama BABS yang dilakukan di Kelurahan Morokrebang telah memberikan pengaruh yang positif terhadap kepemilikan jamban masyarakat.	

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang di peroleh dan setelah dilakukan analisis maka terdapat korelasi yang signifikan antara akses sanitasi dan jumlah KK BABS di daerah perkotaan yaitu di Medan Perjuangan dan Medan Labuhan. Dengan nilai p Value $0,00 < 0,05$ terdapat korelasi diantara kedua variabel dan nilai R yang bermakna kuat. Namun demikian yang menjadi perbandingan di balik KK BABS yang masih cukup tinggi di wilayah pesisir tersebut di sebab kan oleh beberapa hal dimana akses sarana dan akses sanitasi yang kurang yang berdampak pada perilaku BABS. Berbeda dengan daerah perkotaan di Medan Perjuangan akses sarana yang sesuai dan akses yang rata rata tercapai $>80\%$ di beberapa Kelurahan walaupun masih ada beberapa angka perilaku BABS tercatat. Dengan demikian perbandingan kedua wilayah tersebut dengan angka perilaku BABS yang masih tercatat di pengaruhi oleh akses sanitasi dan sarana yang ada pada masyarakat.

Dalam pilar pertama STBM ini yang menjadi acuan dalam keberhasilan STOP BABS adalah perubahan perilaku masyarakat yang tidak membuang air besar secara sembarangan lagi dan mengakibatkan dampak negative bagi makhluk hidp lain dan lingkungan. Sehingga fokus nya adalah perubahan perilaku bukan kepemilikan jamban semata. Dapat dikatakan perilaku masyarakat yang telah STOP BABS ketika masyarakat membuang tinja di tempat tertutup yang tidak mengganggu orang lain di sekitarnya. Sehingga masyarakat ketika masih berperilaku BABS maka dalam program STBM ini masyarakat di picu untuk mau dan mampu membuat tempat pembuangan tinja yang sesuai tidak mecemari lingkungan dan

mengganggu orang sekitar. Sehingga ketika masyarakat sudah melakukan BAB di WC cubluk perilaku tersebut dikatakan STOPBABS, namun berbeda jika masyarakat BAB di jamban namun tinja di alirkan ke selokan atau ke sungai maka hal itu di katakana perilaku BABS.

Oleh karena itu, STOP BABS di bedakan menjadi beberapa akses meliputi, akses aman yang berarti dikatakan akses aman jika masyarakat memiliki WC dan septictank kedap. Septictank kedap apabila bagian atas bawah juga kanan kirinya dicor sehingga, tidak berisiko terjadi pencemaran lingkungan oleh bakteri yang ada di tinja manusia. Septictank ini juga dilakukan penyedotan 5 tahun sekali untuk menghindari penumpukan tinja dan risiko terjadi ledakan septictank. Selanjutnya akses layak apabila memiliki WC dan septictank tidak kedap. adapun septictank tidak kedap jika bagian bawah masih tanah dan masih berisiko mencemari lingkungan. Namun, untuk bagian atas serta kanan kiri sudah dicor. Walaupun begitu, karena bagian bawah masih tanah maka, masih berpotensi mencemari tanah atau sumber air.

Selain itu ada akses tidak layak seperti WC cemplung/cubluk atau BAB yang disimpan di kaleng dan kemudian ditanam. Ada ruangan untuk BAB agar aroma yang ditimbulkan tidak menyebar namun, untuk pembuangan tinja masih dilakukan di tempat yang tidak dianjurkan dan berisiko menyebabkan pencemaran. Selanjutnya akses numpang/sharing komunal dilakukan dengan berbagi jamban kepada masyarakat lain atau menumpang BAB di tempat umum yang memiliki akses aman seperti masjid, kamar mandi umum, rumah tetangga/kerabat, dan lainnya. Dengan demikian, seseorang yang tidak memiliki akses buang air besar yang sesuai bisa menumpang agar tidak terjadi perilaku buang air besar sembarangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah di lakukan Tina Meirindany tahun 2023 dimana terdapat hubungan antar sikap, pengetahuan, penghasilan, dengan kejadian BABS di Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka. Maka diperoleh hasil hubungan antara pengetahuan dengan perilaku BABS nilai p Value $0,00 < 0,05$. Terdapat hubungan antara kebiasaan atau sikap dengan kejadian BABS p Value $0,00$. Namun terdapat juga hubungan antara pendidikan dengan perilaku BABS dengan nilai p Value $0,05$.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengaruh Akses sanitasi terhadap stop Babs pilar pertama STBM diperoleh terdapat hubungan antara akses sanitasi dan jumlah BABS di daerah pesisir maupun di daerah perkotaan berkorelasi dengan nilai p Value $0,001$ yang bermakna terdapat korelasi yang signifikan. Selain itu diperoleh nilai R $0,786$ yang bermakna hubungan yang sangat kuat di antara kedua variable karena $0,786 > 0,76$. Namun perbandingan di KK BABS yang masih cukup tinggi di wilayah pesisir tersebut di sebab kan oleh beberapa hal dimana akses sarana dan akses sanitasi yang kurang yang berdampak pada perilaku BABS. Berbeda dengan daerah perkotaan di Medan Perjuangan akses sarana yang sesuai dan akses yang rata rata tercapai $>80\%$ di beberapa Kelurahan walaupun masih ada beberapa angka perilaku BABS tercatat. Dengan demikian perbandingan kedua wilayah tersebut dengan angka perilaku BABS yang masih tercatat di pengaruhi oleh akses sanitasi dan sarana yang ada pada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian pembuatan jurnal kegiatan LKP diantaranya: kepada Ibu Dosen pembimbing lapangan, kepada pembimbing lapangan instansi, para staf instansi dan para penulis yang sudah berkontribusi atas penyelesaian jurnal ini. Serta memberikan masukan dan saran dalam proses penyelesaian jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, R. (2021). Analisis Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Di Wilayah Kerja Puskesmas Cempae Kota Parepare. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 4(3), 391-402.
- Firzah, N., & Susilawati, S. (2023). Promosi Kesehatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Melalui Pendekatan STBM Pilar Pertama. *SEHATMAS: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 2(3), 511-521.
- Hasibuan, R., Susilawati, S., & Nanda, M. (2021). Pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) pilar BABS di Kota Sibolga. *Shihatuna: Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 1-7.
- Herniwanti, H., Sudarto, E., & Ardiana, A. (2022). Penyuluhan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) pilar 1–stop buang air besar sembarangan (BABS) di Kecamatan Bengkalis, Riau. *Jurnal Abdidas*, 3(3), 465-473.
- Maharja, R., Latief, A. W. L., Bahar, S. N., Gani, H., & Rahmansyah, S. F. (2022). Pengenalan Pengolahan Sampah Berbasis 3R pada Masyarakat Pedesaan sebagai Upaya Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(01), 62-71.
- Meirindany, T. (2023). the Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Desa Pematang Jering Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. *Miracle Journal*, 3(2), 33-38.
- Octavia, Y. T., & Jusniar, E. (2020). Gambaran Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kelurahan Sri Padang Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 5(1), 1-8. Kiritana Kecamatan Kambara Penelitian Deskriptif Analitik (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Ruba, Y. E., Joko, T., & Budiyo, B. (2021). Faktor Pendukung dan Penghambat Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Wilayah Kerja Puskesmas Maronggela Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada. *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat*, 1(2).
- Sandi, W. A., & Febriana, I. (2023). The Phenomenon of Open Defecation Behavior is Motivated by Individual Characteristics and Social Environment. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 12(1), 77-89.
- Sitorus, C. S., Lengkong, F. D. J., & Palar, N. R. (2023). Pengelolaan Sanitasi Pada Fasilitas Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 40-51.
- Wahyuningsih, S. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (Babs) (Studi Kasus Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima). *Jurnal Sanitasi Dan Lingkungan*, 1(2), 52-57.